

Anti-Ilmu Pengetahuan

Agus Pakpahan, INSTITUTIONAL ECONOMIST

Kemunduran suatu bangsa dimulai dengan membudayanya sikap atau nilai anti-ilmu pengetahuan. Apakah kita memiliki sikap atau nilai anti-ilmu pengetahuan itu? Apa ukurannya? Sebagai ilustrasi saja, kita dapat membuat imajinasi kondisi masyarakat yang menghakimi Copernicus atau Galileo, karena sikapnya yang berbeda dengan otoritas kekuasaan pada waktu itu. Ibnu Rusdi atau Averroes juga menunjukkan bagaimana kemajuan ilmu kedokteran akan terhambat oleh tidak dibolehkannya melakukan bedah mayat. "Jangan banyak tanya!" Hardikan orang tua kepada anaknya semacam ini juga berperan dalam membentuk sikap tidak kritis anak-anak tersebut di kemudian hari.

Alam raya menyimpan semua rahasia ilmu Tuhan. Kemudian kaum ilmuwan membuka satu per satu, tahap per tahap rahasia-rahasia tersebut, yang kemudian menyimpannya dalam bentuk buku-buku atau artefak sejarah, misalnya Candi Borobudur. Wujud penyimpanan ilmu pengetahuan yang berkembang pada akhir abad ke-20 adalah perangkat lunak (*software*) komputer dan organisme hasil rekayasa genetik. Dalam konteks ini, sejarah mencatat bahwa penghancuran Perpustakaan Alexandria di Mesir, peninggalan hebat dari Alexander the Great, telah sempat menghancurkan peradaban yang mencapai hampir satu milenium untuk kembali pulih.

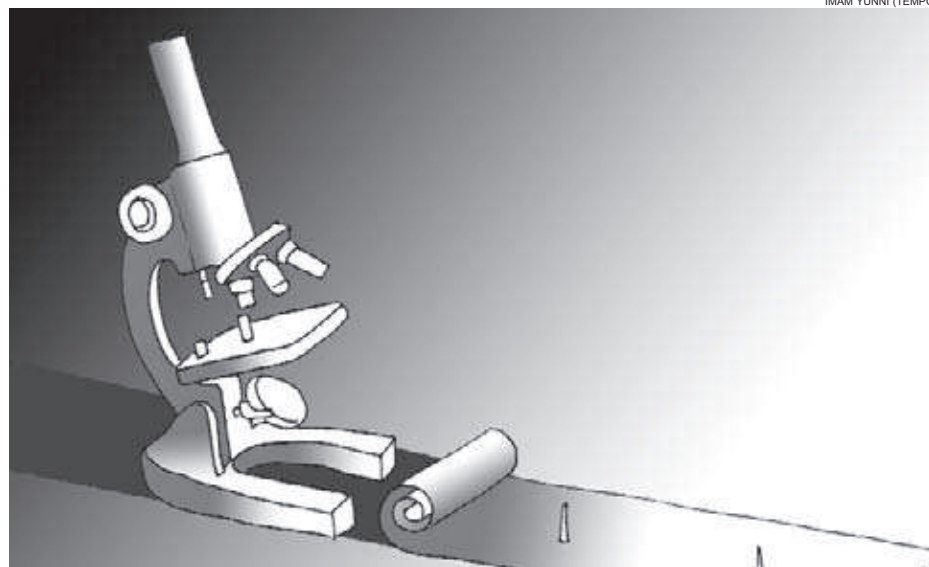
Ilmu pengetahuan dasar yang fungsinya memberikan pencerahan atau penerangan biasanya lebih bersifat *public good*. Artinya, sekali ilmu pengetahuan tersebut ditemukan, maka semua orang bisa menikmatinya. Matematika, fisika, atau ekonomi dapat digolongkan pada kategori *public good*. Cirinya adalah ilmu pengetahuan di bidang ini tidak dapat dipatenkan. Karena itu, ilmuwannya tidak bisa mendapatkan insentif materi (baca: uang) dari hasil penemuannya tersebut, karena hasilnya itu bukan bagian dari proses bisnis.

Dengan menyandang sifat *public good*, tentu sifat ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Namun, seperti udara yang kita hirup ini tidak dipungut biaya, maka kesadaran kita sebagai individu untuk membiayainya rendah.

Ignorance

Menarik untuk dijadikan pertanyaan bersama adalah apakah ilmu pengetahuan merupakan "komoditas" yang langka? Kalau kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai barang yang langka dan manfaatnya besar, ia harus menjadi sikap dan keputusan publik yang diprioritaskan, termasuk dalam pembiayaannya. Tentu ilmu pengetahuan merupakan "komoditas" yang sangat langka.

Persoalannya adalah kita sering tidak menyadari bahwa (1) kita tidak tahu terhadap apa yang tidak kita ketahui; (2) bahwa untuk mendapatkan pengetahuan itu, selain sulit, rumit, dan melelahkan, memerlukan biaya yang tidak sedikit; (3) di luar dedikasi yang tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu diperlukan kejujuran (integritas) yang tidak dapat ditawar lagi. Ilmu pengetahuan bukan untuk diperjualbelikan, karena itu ilmuwan ukurannya bukan sekadar ijazah



IMAM YUNNI (TEMPO)

Di Indonesia, kegiatan riset atau pengembangan sumber daya manusia juga belum dikelompokkan dalam sistem akuntansinya sebagai kegiatan investasi. Keteringgalan ini tentu dimulai dari sikap yang bersifat anti-ilmu pengetahuan, budaya yang sangat merugikan.

atau tingginya gelar.

Perdebatan tentang biaya penelitian atau besaran insentif untuk para peneliti mestinya bukan tugas peneliti untuk mengusulkan ini-itunya. Pengambil kebijakan perlu mencari standar yang layak untuk memberikan kompensasi negara terhadap para peneliti. *Brain drain* akan merugikan Indonesia. Masyarakat luas, khususnya kaum konglomerat, perlu memiliki kesadaran yang tinggi dalam hal ini. Kita sangat paham akan pentingnya keberlanjutan bisnis di era mendatang yang akan makin canggih sifatnya. Tidak mungkin tenaga perusahaan kita memiliki kaliber kelas dunia tanpa dilahirkan dari masyarakat kelas dunia pula. Tentunya hal ini tak terpisahkan dengan investasi di bidang pendidikan.

Struktur alokasi sumber daya

Mari kita sandingkan struktur anggaran dan kekuatan sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelapa sawit antara Malaysia dan Indonesia. Pada 2000, Malaysia mengeluarkan dana riset untuk kelapa sawit melalui MPOB sebesar US\$ 95,2 juta (kurang-lebih Rp 840 miliar), dengan dukungan 188 orang *full time equivalent* peneliti andal. Dengan alokasi dana dan tenaga tersebut, maka kelapa sawit mendapatkan 23,4 persen dari total alokasi dana dan 15,5 persen dari total alokasi tenaga peneliti di bidang pertanian di Malaysia.

Dana penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Indonesia, yang berkan-

tor pusat di Medan, pada 2010 kurang dari Rp 20 miliar. Selain itu, tenaga peneliti S-3-nya hanya 14 orang dan peneliti S-2 sebanyak 19 orang dengan tugasnya di luar penelitian yang cukup banyak hanya untuk mempertahankan institusi tetap hidup. Dapat dibayangkan, dengan nilai minyak mentah sawit lebih dari US\$ 17 miliar, dana investasi untuk pengembangan iptek kelapa sawit di PPKS Medan hanya kurang dari Rp 20 miliar.

Pernah teringat sejarah kejayaan gula di Jawa pada awal 1900-an? Inti dari kejayaan tersebut adalah bahwa perusahaan perkebunan gula pada waktu itu mendirikan pusat penelitian gula terbaik dan terbesar di dunia yang berlokasi di tanah Untung Surapati, Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu kebanggaan dari pusat penelitian gula pada waktu itu adalah keberhasilannya dalam menciptakan klon unggul tebu POJ 2878 pada 1921, di mana klon ini tahan terhadap serangan penyakit *sereh* yang mewabah di seluruh dunia pada masa itu.

Bagaimana dengan kelapa sawit kita, yang telah menjadikan Indonesia sebagai penghasil terbesar sawit dunia? Apakah kita sudah sedia payung sebelum hujan untuk menghadapi kemungkinan munculnya wabah yang akan melanda perkebunan monokultur kelapa sawit di seluruh dunia? Kalau kita *ignorance*, jawabannya adalah hal tersebut tidak mungkin, atau kita lihat nanti saja. Sikap ini adalah sikap anti-ilmu pengetahuan. Gelap.

Sebagai pembanding, kita bisa melihat perkembangan lembaga riset komersial di negara maju. Misalnya Monsanto. Sebagai perusahaan multinasional yang konsentrasi usahanya di bidang perbenihan, mereka mengalokasikan dana per *trait* (jenis khusus) transgenik berkisar US\$ 100-300 juta, dengan dukungan peneliti sekitar 1.300 orang dengan 500 orang di antaranya berkualifikasi S-3.

Relatif terhadap perkembangan di Malaysia untuk bidang kelapa sawit atau terhadap Monsanto yang merepresentasikan korporasi modern di negara maju, posisi kita sangatlah tertinggal. Di Indonesia, kegiatan riset atau pengembangan sumber daya manusia juga belum dikelompokkan dalam sistem akuntansinya sebagai kegiatan investasi. Keteringgalan ini tentu dimulai dari sikap yang bersifat anti-ilmu pengetahuan, budaya yang sangat merugikan. ●

SURAT PEMBACA

Terganggu Pengendara Mobil Arogan

Tingkah para pejabat tinggi kita yang biasa mendapat pengawal untuk menerobos kemacetan rupanya mengilhami oknum-oknum warga Jakarta yang "sakit jiwa" untuk meniru polah mereka. Pada Rabu siang lalu, saya memerogokinya di kawasan Kemang, Jakarta. Di tengah kemacetan di Jalan Kemang Raya, sejak pertigaan gedung Habibie Center, sayup-sayup saya mendengar klakson berkali-kali dibunyikan oleh sebuah mobil SUV, persis yang biasa dibunyikan para pengawal pejabat.

Di pertigaan lampu merah, setelah BCA, saya sengaja menoleh ke belakang untuk mengamati mobil si pengendara, yang ternyata mengendarai mobil KIA Sportage warna hitam. Pengemudinya pemuda gempal berkaus oblong putih. Dia terus menyalakan klakson untuk meminta jalan, meski lampu menyala merah dan kondisinya memang sangat macet. Pemuda itu sadar bahwa saya memperhatikan dia, dan ia sengaja memepetkan mobilnya ke sepeda motor saya. Sadar berhadapan dengan "orang sakit", saya menyingkir. Saya membuntuti dari belakang, dan terlintas untuk memotret mobil itu. Ketika saya tengah membidik, tiba-tiba dia menghentikan mobil (kalau tak salah nomor polisinya B-45-J). Ada stiker kecil bertulisan "Mabes Polri" di dekat *wiper* kaca belakang mobil itu.

Karena menyetir dengan satu tangan, saya nyaris terjatuh, tapi segera melanjutkan perjalanan dengan menyalipnya dari sisi kiri. Mobil itu mengejar dan memepet saya persis di depan Ranch Market. Untuk menghindari hal buruk, saya pilih memutar balik dan menerobos kemacetan ke arah Habibie Center. Sepintas saya mendengar si pengemudi yang turun dari kendaraan meminta saya menghadapinya.

Pejabat atau bukan, jelas perilaku pengemudi itu sangat tidak terpuji. Yang saya pahami, cuma ambulans yang berhak menyalakan sirene dan meminta dispensasi untuk menerobos kemacetan. Hanya orang sok kuasa dan sakit jiwa yang memaksa orang untuk menyingkir di tengah kemacetan, sementara dia tanpa malu menerobos seenak udelya.

Saya berharap instansi terkait menertibkan penggunaan klakson atau sirene semacam itu, termasuk melarang penjualannya secara bebas.

Nama dan alamat
ada di redaksi

SURAT DAN PENDAPAT



Kebayoran Center
BLOK A11-A15,
JALAN KEBAYORAN BARU, MAYESTIK,
JAKARTA 12240



(021) 725 5645/50



(021) 70292900



pendapat@tempo.co.id

UNTUK ARTIKEL PENDAPAT, PANJANG
TULISAN MAKSIMUM 6.000 KARAKTER,
DISERTAI FOTO DAN NOMOR TELEPON
YANG DAPAT DIHUBUNGI.